



KARYA ILMIAH

SMA KOLESE DE BRITTO



DAMPAK KEBIJAKAN RAMAH LINGKUNGAN BAGI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Wisanggeni Kertya Adi ^{a,1*}, Parama Wastu Wirasadya ^{b,2}, Joshua Nathanael Atmaja ^{c,3},

H. Franky Ari Andri Prianto, S.Pd.

^a SMA Kolese De Britto, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

¹ 17725@student.debritto.sch.id;

² 17686@student.debritto.sch.id;

³ 17710@student.debritto.sch.id;

Informasi artikel

Kata kunci:

Ekonomi
Kebijakan
Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengobservasi terkait dampak kebijakan ramah lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada komitmen "Net Zero Emission" yang ditargetkan pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengurangi eksploitasi alam. Kebijakan ini mencakup semua aspek negara, termasuk instrumen perekonomian yang telah berkontribusi besar terhadap eksploitasi alam. Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka, yang melibatkan analisis jurnal, makalah, dan berita online yang telah terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia saling berkorelasi dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara endogen, melalui intensifikasi pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulannya, kebijakan ramah lingkungan Indonesia telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Keywords:

Economy
Policy
Indonesia

ABSTRACT

This research observes the impact of green policies on economic growth in Indonesia, focusing on the "Net Zero Emission" commitment targeted by 2060. The Indonesian government has formulated various green policies to achieve sustainable development and reduce the exploitation of nature. These policies cover all aspects of the country, including economic instruments that have contributed greatly to the exploitation of nature. This research uses the Literature Study method, which involves analyzing verified journals, papers, and online news. The results show that the policies issued by the Indonesian government are correlated and have a positive impact on economic growth endogenously, through the intensification of income distribution and improving the quality of human resources. In conclusion, Indonesia's green policies have significantly contributed to economic growth and sustainable development.

© 2023 (Wisanggeni Kertya Adi). All Right Reserved

Pendahuluan

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, kebutuhan sekunder seperti teknologi, akses kesehatan, hiburan dan lain sebagainya. Perekonomian terus berjalan setiap hari tanpa henti di tempat yang ditinggali manusia saat ini yakni bumi. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang manusia lakukan dengan cara menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi, baik itu yang terbaru dan tidak terbaru. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, seperti pangan, hutan, laut, minyak bumi, gas, batubara dan lain sebagainya (hasil bumi), tidak heran jika Indonesia dijuluki negara maritim dan agraris.

Oleh karena itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang sifatnya ramah lingkungan, fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menekan tingkat eksploitasi alam/kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi. Kebijakan ini berupa penerapan komitmen *Net Zero Emission* melalui pembangunan rendah karbon. Menurut sebuah riset dari Universitas Tidar yang menggunakan data dari world bank dan British Petroleum, penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia merupakan dampak dari urbanisasi, penggunaan energi dan juga penyempitan luas kawasan hutan. Menurut data yang dikeluarkan Bank Indonesia tahun 2022, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5.31% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, timbul dilema; yaitu faktor urbanisasi dan penggunaan energi akan meningkat, begitu juga emisi karbon seiring pertumbuhan tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menginginkan adanya peningkatan produktivitas sebagai kunci dalam pertumbuhan ekonomi (Kemenko Perekonomian, 2023).

Oleh karena itu, Penelitian Ilmiah ini dibuat bertujuan untuk mengetahui apakah Kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu "Dampak Kebijakan Ramah Lingkungan bagi Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia". Penelitian ini dibatasi pada rentang kebijakan periode 2019 - 2022.

Kajian Literatur

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah segala yang ada di luar manusia yang mendukung kehidupan, termasuk binatang, mikroorganisme, tanah, udara, dan air. Definisi ini tercermin dalam hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggambarkan lingkungan sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan suatu organisme.

B. Kebijakan Pemerintah Ramah Lingkungan di Indonesia

Kebijakan ramah lingkungan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan proses produksi tanpa merusak lingkungan. Ini termasuk langkah-langkah pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Dalam sektor ekonomi, pemerintah fokus pada kebijakan ramah lingkungan untuk mengatasi masalah ketimpangan, di mana kerusakan lingkungan dapat merugikan masyarakat kelas bawah yang bergantung pada sumber daya alam.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui pertumbuhan pendapatan perkapita, tetapi teori ini memiliki kelemahan dalam mengukur tingkat standar kehidupan masyarakat dan ketimpangan ekonomi. Sebagai alternatif, teori endogenous growth menganalisis pertumbuhan ekonomi dari faktor internal, seperti teknologi dan peningkatan produktivitas. Indonesia mengalami masalah ketimpangan ekonomi, namun sedang berupaya untuk menguranginya melalui pembangunan infrastruktur dan fokus pada sektor tertentu seperti pariwisata, perikanan, dan

manufaktur. Pendekatan kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan upaya intensifikasi internal dalam pengolahan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini akan menganalisis data menggunakan dua metode. Pertama, analisis deskriptif, yang mendeskripsikan data sebagaimana adanya untuk memberikan gambaran tentang kebijakan ramah lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, analisis kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman fenomena secara mendalam, dalam hal ini peneliti akan menggunakan studi literatur untuk mengolah data. Kedua metode ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

Hasil dan pembahasan

A. Bentuk Kebijakan Ramah Lingkungan di Indonesia

1. Kebijakan Industri Hijau (2019)

Tahun 2019 merupakan langkah awal kebijakan industri hijau yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan adanya perekonomian yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan Industri hijau pada tahun 2019 dikarakterisasikan dengan persiapan sumber daya alam dan juga mensosialisasikan rencana pemerintah kepada perusahaan (PP no. 14 tahun 2014).

Kebijakan Industri hijau pemerintah telah membawa sebanyak 151 perusahaan menjadi bagian dalam program tersebut. Kebijakan industri hijau menginginkan adanya produksi yang bersih dalam segala elemen, seperti yang meliputi:

- A. Bahan baku
- B. Energi
- C. Air
- D. Teknologi proses
- E. Produk
- F. Sumber daya manusia
- G. Kesehatan dan keselamatan kerja

Segala elemen tersebut harus memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikasi industri hijau. Standar tersebut pada intinya menekankan pada efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga dapat memberikan manfaat lingkungan hidup di masyarakat (Permenperin no. 46 2020).

2. Kebijakan Hilirisasi Tambang Indonesia (2020-2021)

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan lapangan kerja dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong industri domestik menggunakan bahan tersebut. Namun, ekspor bahan tambang seperti aluminium, baja, bijih nikel, dan tembaga telah menurunkan produksi dan pengolahan barang tambang dalam negeri, serta menurunkan PDB Indonesia sebesar -2,19% (BPS, 2021).

Pada tahun 2021, Indonesia melanggar aturan WTO dengan memperpanjang larangan ekspor bijih nikel mentah selama dua tahun, yang mengundang kritik dari Uni Eropa dan keluhan dari Norwegia, Kanada, dan Uni Eropa ke WTO.

Meski demikian, kebijakan ini didasarkan pada visi dan misi Indonesia untuk memfokuskan industri perekonomian lokal dalam pengelolaan bahan tambang dengan prinsip ekonomi pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah untuk memanfaatkan bahan tambang, khususnya nikel, untuk penelitian dan pengembangan mobil listrik ramah lingkungan, dengan target menguasai 58% sektor kendaraan pada 2040.

3. Kebijakan Pajak Dalam Perdagangan Karbon (2022)

Perdagangan Karbon adalah kegiatan jual beli antara negara-negara pemilik hutan (penyerap karbon) dengan negara-negara industri penghasil karbon (emitor). Ini menjadi strategi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, perdagangan karbon dapat meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim, sehingga pemerintah menerapkan Pajak Karbon untuk menurunkan tingkat emisi.

Rencana kebijakan perdagangan dan pajak karbon di Indonesia awalnya akan dimulai

pada tahun 2022, namun ditunda hingga tahun 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Penundaan ini didasari oleh beberapa alasan, seperti kondisi pemulihan ekonomi Indonesia, situasi politik dunia terkait invasi Rusia ke Ukraina, dan menunggu mekanisme pasar karbon. Undang-undang harmonisasi pajak menetapkan tarif pajak karbon paling rendah adalah Rp. 30,00/Kilogram Karbondioksida atau Rp. 30.000,00/Ton CO₂, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pajak karbon terendah di dunia.

A. Dampak Kebijakan Ramah Lingkungan Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia

1. Dampak Kebijakan Industri Hijau (2019)

Hadirnya kebijakan industri hijau mempengaruhi pemerataan pendapatan dengan adanya pembangunan di sekeliling lingkungan yang berpengaruh terhadap infrastruktur di dalam lingkungan tersebut. Kebijakan industri hijau berpengaruh pada pemerataan pendapatan karena dalam industri hijau terdapat perhatian khusus yang diberikan terhadap pengembangan kompetensi kerja dari SDM yang digunakan (Saepudin et al., 2020). Oleh karena itu, kebijakan industri hijau mengurangi adanya pekerja yang tidak terlatih. Hal tersebut berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan karena pekerja juga dibekali dengan kompetensi saat mereka bekerja di Industri hijau.

2. Dampak Kebijakan Hilirisasi Tambang (2020-2021)

Kebijakan hilirisasi tambang 2020-2021 memiliki dampak positif yang signifikan:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Hilirisasi tambang mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulawesi (6,64% yoy), diikuti oleh Maluku dan Papua (6,35% yoy), serta Kalimantan (5,56% yoy).
2. **Diversifikasi Produk Ekspor:** Hilirisasi tambang menyebabkan diversifikasi produk ekspor, meningkatkan nilai tambah. Produk ekspor tidak hanya berupa bahan mentah tetapi juga produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Kebijakan ini mendukung pemberdayaan masyarakat dengan melarang ekspor nikel dan mendorong penggunaan industri dalam negeri seperti BUMN. Ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan industri, dan mengembangkan industri lokal, serta meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal.

4. **Peningkatan Produktivitas:** Hilirisasi tambang mendorong penggunaan teknologi untuk mengolah bahan tambang menjadi produk bernilai tambah, meningkatkan efisiensi pengolahan SDA.

3. Dampak Kebijakan Pajak Karbon dalam Perdagangan Karbon (2022)

Kebijakan pajak karbon dalam perdagangan karbon memiliki dampak yang signifikan antara lain:

1. **Pemerataan Pendapatan:** Melalui mekanisme pembangunan bersih seperti Clean Development Mechanism (CDM), negara berkembang dapat membangun infrastruktur ramah lingkungan, meningkatkan teknologi, dan sertifikasi lingkungan, sehingga membantu pemerataan pendapatan.
2. **Peningkatan Pendapatan Negara:** Dengan menerapkan perdagangan dan pajak karbon, Indonesia dapat meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan penelitian Bintang Adi Pratama-2021, dengan besaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah (RP 30,00) dan peningkatan emisi karbondioksida sebesar 3,57% setiap tahunnya, diperkirakan Indonesia dapat memperoleh penghasilan pajak karbon dari sektor energi sebesar 23,651 Triliun dari tahun 2019 hingga 2025.

Dengan adanya kebijakan pajak karbon, memungkinkan pemerintah Indonesia mendapatkan dana tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk:

- Pembangunan industri berbasis ekonomi hijau berkelanjutan.
- Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Investasi teknologi berbasis ramah lingkungan.

- Bantuan dana kepada masyarakat miskin berpenghasilan rendah.

Simpulan

Kami mendapati bahwa dampak yang diberikan oleh kebijakan ramah lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain adalah intensifikasi faktor-faktor internal yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Karena sifat kebijakan ramah lingkungan yang menggunakan sumber daya alam dan manusia yang lokal, hal tersebut menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dan pemberdayaan yang lebih besar di masyarakat. Juga, kebijakan ramah lingkungan tidak mengurangi produktivitas karena dalam menjalankan kebijakannya yang ramah lingkungan pemerintah memanfaatkan teknologi dan manajemen baru akan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah dapat menjalankan agendanya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Ucapan terima kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak H. Franky Ari Andri Prianto, S.Pd. dan Bu E. Megia Nofita, S.T. atas bimbingan, dukungan, dan bantuan yang luar biasa selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Tanpa bantuan dan arahan mereka, kami tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

Semua kontribusi dan bimbingan dari Pak H. Franky Ari Andri Prianto, S.Pd. dan Bu E. Megia Nofita, S.T. sangat berarti bagi kami dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih

Referensi

Angga Wijaya Holman Fasa. (2021), *Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Volume 10, nomor 3.

Arifin (2012). *Politik Ekologi : Ramah Lingkungan Sebagai Pembetulan*. Jurnal Ilmu Sosial Vol 1, No 1

Aghion & howitt (1998). *Effect of Foreign Direct Investments on Economic Growth in CEMAC Zone: Role of Human Capital* <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2898023>

Achdiat Atmawinata. (2012). *Pendalaman Struktur Industri: Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau*. Staff Ahli Menteri.

Bintang Adi Pratama (2022). *Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon*. Jurnal Ekonomi

Khoirunisa Wahida, Hoirul Uyun. (2023). *Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy*, Volume 1, nomor 2.

Kohler et al (2006). *The Transition to Endogenous Technical Change in Climate-Economy Models: A Technical Overview to the Innovation Modeling Comparison Project*. Jurnal Ekonomi

Oki Hermansyah Febrianto. (2022). *Penguatan Struktur Ekonomi Indonesia: Tinjauan Local Value Chain, Hilirisasi dan Industri Hijau*. Bank Indonesia Institute.